EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN E-WARONG KUBE PKH DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis

Oleh

RAHAYU
164 020 0116

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2020

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN E-WARONG KUBE PKH DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Manajemen Bisnis

Oleh

RAHAYU
164 020 0116

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Darwis Harahap, S. HI., M. Si	Aliman Syahuri Zein, S.E.I., M.E.I.
NIP: 19780818 200901 1 015	

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2020

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **RAHAYU**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 2 Maret 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RAHAYU** yang berjudul **"Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S. HI., M. Si
NIP: 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Aliman Syahuri Zein, S.E.I., M.E.I.

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	RAHAYU
NIM	:	16 402 00116
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	**Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 2 Maret 2020

METERAI TEMPEL
A5268AHF253393033
6000
ENAM RIBU RUPIAH

a yang Menyatakan,

RAHAYU
NIM. 16 402 00116

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: RAHAYU
NIM	: 16 402 00116
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara".** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 2 Maret 2020
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
44D77AHF253393038
6000
ENAM RIBU RUPIAH

RAHAYU
NIM. 16 402 00116

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA	**: RAHAYU**
NIM	**: 16 402 00116**
FAKULTAS/JURUSAN	**: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah MB-2**
JUDUL SKRIPSI	**: Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19831703 201801 2 001

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd
NIP. 19831703 201801 2 001

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Muhammad Isa, S.T., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Selasa/ 02 Juni 2020**
Pukul	**: 09.00 WIB s/d 11.30 WIB**
Hasil/Nilai	**: Lulus/ 78,75 (B)**
Index Prestasi Kumulatif	**: 3,63**
Predikat	**: CUMLAUDE**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN E-WARONG KUBE PKH DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

NAMA : RAHAYU
NIM : 16 402 00116

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 01 Juli 2020
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN PADANGSIDIMPUAN

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rahayu
Nim : 16 402 00116
Judul Skripsi : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Salah satu permasalahan yang sering dialami oleh negara berkembang adalah masalah kemiskinan, tidak terkecuali negara Indonesia. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, dimana di dalamnya terdapat rancangan program E-Warong KUBE PKH sebagai sarana mempercepat pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengevaluasi pelaksanaan E-Warong KUBE PKH. Evaluasi menurut Dunn dalam Nugroho mengatakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan dan memberi informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja sebuah kebijakan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. E-Warong KUBE PKH merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang informan yang masing-masing diwakilkan 3 orang per desa.

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, dan observasi dilakukan observasi langsung ke lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan perencanaan dan teori dimana masih kurang respon atau peran anggota PKH terhadap program E-Warong KUBE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara belum maksimal dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan E-Warong KUBE belum maksimal dilaksanakan diantaranya, kurang kesadaran anggota PKH terhadap tanggungjawab E-Warong KUBE yang menyebabkan E-Warong KUBE belum bisa dikatakan berhasil dalam peningkatan perekonomian bersama dan kurangnya pemahaman anggota PKH dalam menggunakan teknologi khususnya dalam penggunaan mesin gesek.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, E-Warong KUBE PKH.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **"Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara"** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si, selaku pembimbing I dan bapak Aliman Syahuri Zein, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Ngatino, Ibunda Legiem, saudaraku Wulandari, Pratiwi, Andoko dan Dimas) yang paling berjasa dalam hidup penulis. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
7. Untuk sahabat penulis Siska Ariyani, Erianti Puspa Simbolon, Rahmi Amanda, Nurainun Ritonga, Devi Hardianti, Nur Hikma Siregar, Nuraini,

Nurhasanah, Indra Saputra, Ihsan Mulia, Mahmud Pasaribu, Zul Fadli Hrp, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Ekonomi Syariah 3 Manajemen Bisnis-2, angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Maret 2020

Penulis

RAHAYU
NIM. 16 402 00116

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	**Nama Huruf Latin**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
..... وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى...َ...ا ....َ...	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى..ِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
....ُو	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima,* Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Batasan Istilah 6

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian 7

F. Kegunaan Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Landasan Teori 9

1. Evaluasi 9

a. Pengertian Evaluasi 9

b. Jenis Evaluasi 10

c. Tujuan Evaluasi 13

d. Model-Model Evaluasi 16

2. Pelaksanaan 24

a. Pengertian Pelaksanaan 24

b. Faktor –Faktor yang Menunjang Program Pelaksanaan 25

3. E-Warong KUBE PKH 26
a. Pengertian E-Warong KUBE PKH 26
b. Tujuan E-Warong KUBE PKH 27
c. Pembentukan E-Warong KUBE PKH..... 27
d. Hak dan Kewajiban Anggota E-Warong KUBE PKH..... 28
e. Pendamping E-Warong KUBE PKH..... 29
f. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam..... 30
4. Kementerian Sosial (Kemensos) 33
5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. 33
B. Penelitian Terdahulu 37
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 48
B. Jenis Penelitian..... 48
C. Subjek Penelitian 49
D. Sumber Data..... 50
E. Teknik Pengumpulan Data..... 50
1. Observasi Lapangan..... 51
2. Wawancara..... 51
3. Dokumentasi 52
F. Teknik Analisis Data..... 52
1. Reduksi Data (*Data Reduction*) 53
2. Penyajian Data (*Data Display*) 53
3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*) 54
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 54
1. Perpanjangan Keikutsertaan..... 54
2. Ketekunan Pengamatan..... 55
3. Triangulasi..... 55
4. Menggunakan Bahan Referensi 56
H. Sistematika Pembahasan..... 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 59
A. Gambaran Umum Tentang Kota Padangsidimpuan 59

1. Sejarah Kota Padangsidimpuan 59
2. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan 61
B. Gambaran Umum Tentang E-Warong KUBE PKH 62
1. Sejarah E-Warong KUBE PKH 62
2. Tujuan E-Warong KUBE PKH 65
3. Rancangan Program 65
4. Struktur Organisasi E-Warong KUBE PKH 70
C. Hasil Penelitian 71
1. Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 71
a. Desa Salambue 72
b. Desa Huta Koje 78
c. Desa Labuhan Rasoki 83
2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara 92
a. Efektivitas 93
b. Efisiensi 95
c. Kecukupan 98
d. Perataan 99
e. Responsifitas 100
f. Ketepatan 103
BAB V PENUTUP 106
A. Kesimpulan 106
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT RISET
SURAT BALASAN RISET
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1	Tipe Evaluasi Dunn	22
Tabel 1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2.1	Indikator Hasil Penelitian Efektifitas.....	94
Tabel 2.2	Indikator Hasil Penelitian Efisiensi	96
Tabel 2.3	Indikator Hasil Penelitian Kecukupan	98
Tabel 2.4	Indikator Hasil Penelitian Perataan	100
Tabel 2.5	Indikator Hasil Penelitian Responsifitas.....	102
Tabel 2.6	Indikator Hasil penelitian Ketepatan	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi E-Warong KUBE PKH..... 70

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Suatu negara tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Masalah pengangguran, ketenagakerjaan, kenaikan harga (*inflasi*) dan kemiskinan di Indonesia sudah menjadi masalah pokok dan membutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menghambat langkah Negara Indonesia menjadi Negara Maju.

Indonesia sendiri memiliki solusi untuk menangani masalah kemiskinan yang sedang melanda di berbagai daerah di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pihak Pemerintah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di setiap daerah di Indonesia. Program ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik). Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang distabilitas

dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Disamping itu, pihak pemerintah khususnya Kemensos juga membuat rancangan usaha berbasis E-Warong KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. E-Warong KUBE menjadi salah satu wadah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjalankan usaha bersama yang nantinya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat dari segi ekonomi.

Program ini dirancang sebagai upaya langkah strategi yang berdampak pada perbaikan ekonomi yang positif dalam pelaksanaan dan penerapan PKH dalam satu wilayah pengembangan. Keberadaan E-Warong KUBE PKH ini di tengah-tengah masyarakat juga diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu sendiri.

Keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan yang sedang melanda Negeri ini khususnya masalah kemiskinan sudah sangat memadai, terbukti dengan berbagai program sosial yang sangat merakyat. Semua program ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan yang sedang menjadi permasalahan terbesar di Negeri ini.

Namun, dibeberapa daerah di Indonesia masih ada yang belum memanfaatkan program ini secara maksimal. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota

Padangsidimpuan misalnya. Pengadaan E-Warong KUBE di Kecamatan ini terdapat di tiga lokasi yaitu, Desa Salambue, Desa Huta Koje, dan Desa Labuhan Rasoki. Tercatat masih belum memberikan dampak yang begitu besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Walaupun sebenarnya masih terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengadaan E-Warong KUBE ini masih kurang maksimal.

Berdasarkan observasi peneliti pada dasarnya jika dilihat dari segi keseluruhan, E-Warong KUBE ini memiliki peluang yang besar untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Secara umum berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping Desa Hutakoje yaitu Bapak Rozi yang mengatakan bahwa "*tempat, fasilitas serta modal untuk membangun E-Warong KUBE tersebut diadakan oleh pihak Kemensos*".[1] Alasan lain dikatakannya E-Warong KUBE ini memiliki peluang dilihat dari segi tempat, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Desa Salambue mengatakan bahwa "*tempat berdirinya E-Warong KUBE cukup strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat serta kebutuhan masyarakat seperti sembako juga tersedia disana*".[2] Hasil wawancara dengan pendamping Desa Labuhan Rasoki mengatakan bahwa "*Dengan adanya E-Warong KUBE diharapkan anggotanya mampu untuk lebih mandiri di bidang ekonomi khususnya, misalnya mampu mendirikan usaha sendiri serta mensejahterakan anggotanya"*.[3]

---

[1]Wawancara dengan Bapak Rozi, Pendamping Desa Huta Koje PKH, Tanggal 11 Februari 2019, Pukul 09:30 WIB.

[2]Wawancara dengan Ibu Beby, Pendamping Desa Salambue PKH, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 10:30 WIB.

[3]Wawancara dengan Bapak Ahyar, Pendamping Desa Labuhan Rasoki PKH, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 13:30 WIB.

Atas dasar inilah peneliti merasa tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Evalusi merupakan suatu program untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana tindak lanjut atas perbedaan itu. Jadi tampak jelas bahwa untuk melakukan evaluasi dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan, seperti misalnya yang terdapat dalam suatu program kerja.[4]

Berdasarkan pengertian dari evaluasi tersebut, ada lima kategori yang menjadi acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan E-Warong KUBE, yaitu: Pertama riset, evaluasi merupakan salah satu jenis riset, yang tunduk kepada kaidah-kaidah ilmu penelitian. Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan kaidah-kaidah ilmu penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan E-Warong KUBE di Padangsidimpuan Tenggara, yaitu menggunakan ilmu penelitian kualitatif.

Kedua, objek evaluasi (apa yang akan dievaluasi). Adapun yang menjadi objek evaluasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program E-Warong KUBE yang dirasa masih kurang efektif, sehingga belum memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan seorang pendamping PKH Bapak Rozi. Peneliti bertanya, "*menurut Bapak bagaimana pelaksanaan E-Warong KUBE dari awal berdiri sampai*

---

[4]Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta: PT Gramedia utama, 2005), hlm. 43.

sekarang, karena akhir-akhir ini saya melihat warung tersebut sering tutup?". Bapak Rozi menjawab, "*kalau peningkatan pasti ada, memang akhir-akhir ini kita belum fungsikan seperti biasanya, kita mau memperbaiki manajemen E-Warongnya."*[5]

Ketiga informasi, tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi. Sesuai dengan tujuan evaluasi tersebut peneliti berupaya mengumpulkan informasi terkait dengan E-Warong KUBE dari berbagai sumber.

Keempat menilai, evaluasi melakukan penilaian kualitas baik-buruknya atau tinggi rendahnya kualitas kinerja program yang dievaluasi dan penilaian manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan program E-Warong KUBE, sehingga tercapai tujuan dari program tersebut.

Kelima mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber terkait objek evaluasi diperguanakn untuk mengambil keputusan yang terbaik, demi tercapainya tujuan dari program yang menjadi objek evaluasi yaitu E-Warong KUBE.

Atas dasar inilah peneliti tertarik ingin mengevaluasi dan mengungkap apa sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga E-Warong KUBE tersebut belum mampu melaksanakan program sesuai harapan. Sehingga peneliti dapat mengambil judul penelitian, "Evaluasi Terhadap Pelaksanaann E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara."

---

[5]Wawancara dengan Bapak Rozi, Pendamping Desa Huta Koje PKH, tanggal 06 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi yakni untuk mengetahui evaluasi terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mulai dari proses pengadaan dana sampai pada kegiatan usaha tersebut.

C. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun, sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi menurut KBBI adalah upaya penilaian secara teknis dan ekonomis terhadap suatu cebakan bahan galian untuk kemungkinan pelaksanaan penambangannya.
2. Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

3. E-Warong KUBE PKH adalah program pelayanan publik dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial yang dahulunya berupa bantuan uang tunai menjadi bantuan non-tunai.[6]
4. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarg Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga penerima Manfaat (KPM) PKH.[7]

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan tenggara?
2. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

---

[6]Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*, 2016.

[7]Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 2019, hlm. 9.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Sebagai bahan bacaan atau rujukan bagi pihak pembaca tentang evaluasi terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE.
   b. Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak Kemensos dan Anggota E-Warong KUBE PKH.
   c. Memperluas pengetahuan peneliti tentang Manajemen Bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Untuk peneliti: sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam mengevaluasi pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.
   b. Untuk pihak Kemensos dan E-Warong KUBE PKH: sebagai bahan bacaan dan masukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.
   c. Untuk pihak kampus: sebagai bahan acuan atau bacaan dalam kegiatan pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.
   d. Untuk pihak pembaca/mahasiswa: sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Para pakar evaluasi memformulasikan berbagai defenisi mengenai evaluasi dengan formulasi yang berbeda, akan tetapi inti isinya sama. Dalam buku Evaluasi Teori, Model, Strandar, Aplikasi dan Profesi karangan Wirawan mendefinisiskan riset evaluasi atau evaluasi sebagai *riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi*.[8]

Evaluasi merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dari hasil evaluasi biasanya diperoleh tentang atribut atau sifat-sifat yang terdapat pada individu atau objek yang bersangkutan. Selain menggunakan tes, data juga dapat dihimpun dengan menggunakan angket, observasi, dan wawancara atau bentuk instrumen lainnya yang sesuai. Sedangkan menurut Brinkerhoff dalam Sawitri, evaluasi adalah penyelidikan (proses pengumpulan informasi) yang sistematis dari berbagai aspek pengembangan program

[8]Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 7

profesional dan pelatihan untuk mengevaluasi kegunaan dan kemanfaatannya.[9]

Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai. Hal senada dikemukakan oleh Djali, Mulyono, dan Ramly mendefenisikan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.

Evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Denzin dan Lincoln mengatakan bahwa evaluasi program berorientasi sekitar perhatian dari penentu kebijakan dari penyamdang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Jenis Evaluasi

1. Jenis evaluasi menurut objeknya

Evaluasi dapat dikelompokkan berdasarkan objeknya dan menurut fokus dalam suatu program. Menurut objeknya evaluasi dapat dikelompokkan menjadi:[10]

a) Evaluasi kebijakan

Setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien dan untuk pertanggungjawaban pelaksanaannya.

[9]Agustanico Dwi Muryadi, "Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi," dalam *Jurnal Ilmiah Penjas*, Volume 3, No. 1, Januari 2017, hlm. 3.

[10]Wirawan, *Op.,Cit*, hlm. 16.

Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada, sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

b) Evaluasi program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Jadi evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

c) Evaluasi proyek

Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.

d) Evaluasi material

Evaluasi melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu.

e) Evaluasi sumber daya manusia

Untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia dilakukan program pengembangan sumber daya manusia atau *human resources development*. Program tersebut berupa

pelatihan (*training*), pendidikan (*education*), dan pengembangan (*development*). Program ini perlu dievaluasi untuk menentukan apakah program tersebut berjalan sesuai yang direncanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Jenis evaluasi menurut fokusnya

Menurut fokusnya, evaluasi dapat digolongkan menjadi:[11]

a) Asesmen kebutuhan

Asesmen kebutuhan (*need assessment*) adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Kebutuhan (*need*) adalah ketimpangan (*gaps*) antara kondisi atau keadaan sekarang atau apa yang terjadi dengan keadaan yang diinginkan atau keadaan yang seharusnya.

b) Evaluasi proses

Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program.

c) Evaluasi keluaran

Evaluasi keluaran (*outcome*) merupakan evaluasi sumatif yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data yang dijaring antara lain mengenai:[12]

(1) Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncakan.

---

[11]*Ibid*., hlm. 19.
[12]*Ibid*., hlm. 21.

(2) Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan yang direncanakan.

(3) Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan layanan.

(4) Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar pengaruh program dapat berlangsung terus-menerus.

d) Evaluasi efisiensi

Evaluasi mengenai biaya program ada dua jenis, yaitu *cost benefit evaluation* (evaluasi benefit biaya) yang berfungsi mengukur masukan dan keluaran dalam pengertian keuangan. Program yang kedua yaitu *cost effectiveness evaluation* mengukur input program dalam pengertian keuangan dan keluaran dalam pengertian nonkeuangan.

c. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain adalah:[13]

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat.

[13]*Ibid*., hlm. 22.

2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
5. Pengembangan staf program. Evaluasi dapat digunakan mengembangkan kemampuan staf garis depan yang langsung menyajikan layanan kepada klien dan para pemangku kepentingan lainnya.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang. Sering suatu program disusun untuk melaksanakan undang-undang tertentu. Suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
7. Akreditasi program. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melindungi anggota masyarakat yang memakai jasa layanan lembaga tersebut. Untuk itu lembaga-lembaga tersebut dievaluasi dengan membandingkan standar layanan tersebut.
8. Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*. Untuk melaksanakan suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi mempunyai keterbatasan jumlahnya.

9. Mengambil keputusan mengenai program. Salah satu tujuan evaluasi program adalah untuk mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya, maka mungkin program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata hasil program buruk atau kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan.
10. Accountabilitas. Evaluasi dilakukan juga untuk pertanggungjawaban pimpinan dan pelaksana program. Semua program perlu dipertanggungjawabkan oleh para penyelenggara program.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Posavac dan Carey mengemukakan bahwa evaluasi merupakan *loop* balikan untuk layanan program sosial. *Loop* tersebut merupakan proses mengakses kebutuhan, mengukur pelaksanaan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengevaluasi prestasi pencapaian tujuan program, membandingkan pengaruh keluaran program dengan biaya serta perubahan yang diciptakan oleh layanan program terhadap anggota masyarakat.
12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Menurut pemikiran Tyler bahwa evaluasi harus mengukur pencapaian tujuan program mulai muncul teori evaluasi. Paralel dengan perkembangan teori ilmu evaluasi adalah berkembangnya profesi khusus dalam bidang evaluasi. Profesi evaluasi memerlukan teori evaluasi untuk

merancang, melaksanakan, dan melakukan evaluasi meta (*metaevaluation*).[14]

d. Model-Model Evaluasi

Ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program. Model-model tersebut diantaranya:[15]

1. *Discrepancy Model* (Provus)

Evaluasi model kesenjangan (*discrepancy model*) menurut Provus adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program.

2. *CIIP Model* (Daniel Stufflebeam's)

Evaluasi konteks (*context*) dimaksud untuk menilai kebutuhan, masalah, aset dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang dan hasilnya. evaluasi masukan (*input*) dilaksanakan untuk menilai alternatif pendekatan, rencana tindak, rencana staf dan pembiayaan bagi kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi proses (*process*) ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna

[14]*Ibid*., hlm. 25.
[15]*Ibid*., hlm. 4.

membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan hasilnya. Evaluasi hasil (*product*) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai, diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang, baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.[16]

Model CIPP (*Context*, *Input*, *Process* dan *Product*) merupakan model evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki.

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Nana Sudjana dan Ibrahim menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut:[17]

a) *Context* : situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan.
b) *Input* : kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program pembinaan.

[16]*Ibid*., hlm.5.
[17]*Ibid*., hlm. 5.

c) *Process* : pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

d) *Product* : hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut.

Model CIPP merupakan model yang berorientasi kepada pemegang keputusan. Model ini membagi evaluasi dalam empat macam, yaitu:[18]

1) Evaluasi konteks melayani keputusan perencanaan yaitu membantu merencanakan pilihan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai dan merumuskan tujuan program.
2) Evaluasi input atau masukan untuk keputusan strukturisasi yaitu menolong mengatur keputusan menentukan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
3) Evaluasi program melayani keputusan implementasi, yaitu membantu keputusan sampai sejauh mana program telah dilaksanakan.
4) Evaluasi produk untuk melayani daur ulang keputusan. Keunggulan model CIPP merupakan sistem kerja yang dinamis.

[18]*Ibid*., hlm. 8.

3. *Responsive Evaluation Model* (Robert Stake's)

Model ini menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melainkan pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat dan berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka model ini kurang percaya terhadap hal-hal yang bersifat *kuantitatif*. Instrumen yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi lapangan maupun tak langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, mengecek pengetahuan awal dan mengembangkan desain atau model.

4. *Formative-Summatif Evaluation Model* (Michael Scriven's)

Scriven menyebutkan tanggungjawab utama dari para penilai adalah membuat keputusan. Akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang bervariasi. Scriven mencatat sekarang setidaknya ada 2 peran penting yaitu:[19]

a) Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi formatif dilaksanaakn pada saat implementasi program sedang berjalan.

[19]*Ibid*., hlm. 11.

b) Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai manfaat suatu program sehingga dari hasil evaluasi akan dapat ditentukan suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan.

Purwanto mengemukakan model evaluasi yang diungkapkan Scriven, bahwa evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat sistem masih dalam pengembangan yang penyempurnaanya terus dilakukan atas dasar evaluasi. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah sistem sudah selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan.[20]

5. *Measurement Model* (Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel)

Model ini sangat menitikberatkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat (*atribute*) tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa, dalam bentuk unit ukuran tertentu.

6. *Goal-Free Evaluation Approach* (Michael Scrivwn's)

Model evaluasi bebas tujuan maksudnya, bahwa para evaluator atau penilai mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh-pengaruh nyata atau kongkrit dan pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan dalam program pendidikan dan pelatihan. Ciri-ciri evaluasi bebas tujuan adalah sebagai berikut:[21]

a) Evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan program.

[20]*Ibid*., hlm. 12.
[21]*Ibid*., hlm.14.

b) Tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan menyempitkan fokus evaluasi.

c) Berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan.

d) Hubungan antara evaluator dengan manajer atau dengan karyawan proyek sedapat-dapatnya sangat minimum.

e) Evaluasi menambah kemungkinan ditemukannya dampak yang tak diramalkan.

7. Model Evaluasi William Dunn

Dunn dalam Nugroho mengatakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan dan memberi informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja sebuah kebijakan.[22] Dengan demikian, walaupun evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan terutama dalam hal implementasi kebijakan publik. Kriteria evaluasi kebijakan meliputi:

[22]Digilib.unila.ac.id oleh Yeen Gustiance, "*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai* (BPNT) *Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (*Sustainable Developmentgoals/SDGS*) Di Kota Bandar Lampung" (Tesis Online, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019), hlm, 30. Di Akses pada Tanggal 07 Februari 2020, Pukul 10:30 WIB.

Tabel 7.1
Tipe Evaluasi Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, manfaat bersih, rasio *cost-benefit*
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawis
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu	Konsistensi dengan survai warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Nugroho (2017: 785-786)

Penjabaran tipe kriteria evaluasi menurut Dunn dijelaskan dalam Rusli sebagai berikut:[23]

a. Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu. Adapun menurut Rusli, efektivitas menjadi sangat penting tidak hanya tentang kewenangan pemerintah yang semakin luas dalam mengelola dana masyarakat, tetapi juga terkait dengan upaya pencapaian tujuan kebijakan yang dilakukan. Sedangkan Stoner dalam Rusli mendefinisikan efektivitas sebagai sebuah kapasitas untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

[23]*Ibid*, hlm. 31.

b. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya adalah biaya, rasio keuntungan dan manfaat. Sedangkan Stoner dalam Rusli mendefinisikan efisiensi sebagai kapasitas dalam meminimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.
c. Penilaian terhadap ketepatan dalam menjawab masalah ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Sedangkan menurut Suharto ketepatan adalah suatu keadaan di mana tujuan program atau hasil yang diharapkan sesuai dengan prioritas pemerintah/kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
d. Penilaian terhadap perataan (*equity*) ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan distribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.
e. Penilaian terhadap responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.
f. Penilaian terhadap ketepatgunaan/kecukupan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/rencana/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat kepada target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

2. Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.[24]

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.[25]

Dari pengertian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan

---

[24]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

[25]*Ibid*., hlm. 73.

maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

b. Faktor-Faktor yang Menunjang Program Pelaksanaan

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:[26]

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

2. *Resouces* (sumber daya)

Dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

[26]*Ibid*., hlm. 77.

4. Struktur birokrasi

SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:[27]

a) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
b) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
c) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

3. E-Warong KUBE PKH

a. Pengertian E-Warong KUBE PKH

Program E-Warong KUBE PKH merupakan metode yang digunakan untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial No. 25

[27]*Ibid*., hlm. 79.

Tahun 2016 Tentang Kelompok Usaha Bersama. Dalam peraturan Menteri dijelaskan bahwa, Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.[28]

b. Tujuan E-Warong KUBE PKH

E-Warong KUBE PKH bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.[29]

c. Pembentukan E-Warong KUBE PKH

1. E-Warong KUBE PKH dibentuk dengan kriteria:[30]
   a) Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama.
   b) Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.
   c) Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal dan usaha.
2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga.

---

[28]Undang-Undang Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 tentang Kelompok Usaha Bersama Pasal 1 ayat 1.

[29]*Ibid*.

[30]*Ibid.*

3. KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekretris, bendahara, dan anggota.
4. Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
5. Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil dan atau rentan sosial ekonomi yang berasal dari rujukan program dan atau nonrujukan program.
6. Keanggotaan KUBE berakhir apabila:[31]
   a) Meninggal dunia
   b) Mengundurkan diri
   c) Tidak aktif secara permanen
   d) Pindah ke kecamatan lain
   e) Tidak menaati aturan dalam kelompok
   f) Sakit permanen dan
   g) Melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Hak dan Kewajiban Anggota E-Warong KUBE PKH

1. Anggota KUBE mempunyai hak, yaitu:[32]
   a) Memilih atau dipilih menjadi pengurus
   b) Mengemukakan pendapat dan gagasan
   c) Mengelola usaha atau kegiatan
   d) Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama

[31] *Ibid*.
[32] *Ibid*.

e) Menerima bagian dari hasil usaha, dan

f) Ikut merumuskan aturan kelompok

2. Anggota KUBE berkewajiban:

a) Mematuhi aturan kelompok yang telah disepakatai bersama

b) Menghadiri dan aktif dalam rapat anggota

c) Memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif

d) Aktif dalam proses usaha KUBE

e) Membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok

f) Menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan

g) Menanggung bersama kerugian usaha kelompok

e. Pendamping E-Warong KUBE PKH

Petugas pelaksana pendamping KUBE meliputi:[33]

1. Supervisor, yaitu yang bertugas mengoordinasikan koordinator dalam wilayah kabupaten/kota.
2. Koordinator, yaitu yang bertugas menggordinasikan pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis dalam wilayah kecamatan.
3. Pendamping desa/kelurahan/nama lain yang sejenis, yaitu yang bertugas melaksanakan pendampingan KUBE dalam wilayah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis.

[33]*Ibid*.

Pendamping pelaksanan KUBE berasal dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pengurus lembaga kesejahteraan sosial, tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat. Selain pendamping yang tersebut di atas, pendamping KUBE dapat juga berasal dari Pendamping PKH atau Pendamping KAT.

f. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam

Terdapat ayat pilihan yang terkait dengan kesejahteraan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang diharapkan dapat mempresentasikan kesejahteraan pada ranah pribadi dan keluarga/masyarakat. Dalam hal ini, ada keterkaitan antara ayat tersebut dengan program E-Warong KUBE PKH, yang mana tujuan awal dari program ini yaitu mensejahterakan rakyat miskin untuk masuk kepada golongan mandiri sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta memperbaiki perekonomian bersama. Ayat yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 26.

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: "*dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*".[34]

Pemberian yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas kepada hal-hal materi tetapi juga immateri. Mayoritas ulama

[34]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Jumanatul 'Ali-Art, 2005, hlm. 285.

menilai perintah dalam hal membantu sesama sebagai anjuran, bukan perintah wajib. [35]

Berdasarkan ayat di atas ditegaskan untuk saling membantu terhadap sesama, yang dianjurkan untuk mendahulukan kerabat dekat dan kemudian orang lain, dan tidak bersikap berlebih-lebihan sesuai kalam Allah, bahwa Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan.

Terkait dengan tujuan E-Warong KUBE, bahwa program didalamnya selaras dengan ayat ini, yang bertujuan mampu mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Selain kesejahteraan berdasarkan tujuan utama dari program E-Warong KUBE PKH, dalam penelitian ini peneliti juga memaparkan kesejahteraan dalam penggunaan elektronik. Penggunaan elektronik sangat membantu dalam proses pembiayaan di E-Warong KUBE PKH, akan tetapi sampai sejauh ini penggunaan elektronik masih kurang dalam pengaplikasiannya karena tidak semua anggota PKH mampu untuk menggunakannya. Dalam pandangan Islam layanan pembiayaan dalam bentuk elektronik diperbolehkan jika memenuhi

[35]M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 451.

ketentuan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Ayat yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu Q.S Al-Baqarah Ayat 282

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*."

Adapun ketentuan terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:[36]

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram,
2. Akad Baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundnag-undangan yang berlaku,
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-ba'i*, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh,
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat

[36]Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundnag-undangan,

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dalam penelitian ini, pembiayaan berbasis elektronik pada E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara belum terealisasikan sesuai dengan fatwa DSN MUI, karena dalam penelitian ini E-Warong KUBE PKH belum berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Kementerian Sosial (Kemensos)

Kementerian sosial adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial.

5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain:[37]

[37]Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 2019, hlm. 25.

a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
b. Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program.
c. Kementerian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan negara memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial.
d. Kementerian Kesehatan RI, berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan.
e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi pendidikan.
f. Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara Nasional.
g. Kementerian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan data kependudukan KPM PKH.
h. Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk Basis Data Terpadu.
i. Pemerintah Provinsi daan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (*sharing*) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1. Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan bertujuan:[38]

a) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

2. Sasaran PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memilliki komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial.[39]

3. Kriteria komponen

Kriteria komponen PKH terdiri atas:

a) Kriteria komponen kesehatan meliputi:
   (1) Ibu hamil/menyusui, dan
   (2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

[38]*Ibid*, hlm. 25.
[39]*Ibid*, hlm. 26.

b) Kriteria komponen pendidikan meliputi:

(1) Anak SD/MI atau sederajat

(2) Anak SMP/MTs atau sederajat

(3) Anak SMA/MA atau sederajat, dan

(4) Anak usia enak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

c) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

(1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan

(2) Penyandang disabilitas berat

4. Hak dan kewajiban KPM PKH[40]

a) Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

(1) Menerima bantuan sosial

(2) Pendampingan sosial

(3) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, dan

(4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b) Kewajiban peserta PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut:

[40]*Ibid*, hlm. 27.

(1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

(2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun

(3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat

(4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan (P2K2) setiap bulan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil
1.	Delfi Ulan Dari (Skripsi, Ilmu Administrasi Publik, Fakultas	Implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha	Hasil penelitian menunjukkan bahwa,Koperasi Masyarakat Indonesia

	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018)	Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong Kube PKH) Pada Dinas Sosial Kota Medan	Sejahtera (KMIS) yang belum terbentuk dapat dibentuk agar pemasokan bahan pangan di e-Warong dapat dengan mudah dikontrol, mendata kembali masyarakat miskin disetiap daerah, masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang.
2.	Radita Husnaini (Skripsi, Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017)	Publikasi Humas Kementerian Sosial (Survey Deskriptif: Program E-Warong KUBE PKH Hadir di Jakarta Pusat, di *majalahkartini.co.id* tanggal 19 Agustus 2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dimensi dengan nilai *mean* tertinggi dimiliki oleh meng-*counter* opini bublik. 2. Dimensi dengan nilai *mean* terendah dimiliki oleh membina hubungan baik denagn publik. 3. Indikator tertinggi adalah sikap positif hal ini menunjukkan

			tercapainya salah satu tujuan publikasi yaitu meng-*counter* pendapat umum yaitu keluhan mengenai pencairan dana yang harus antri di kantor pos,tetapi dengan adanya e-warong sekarang pencairan dana menjadi non tunai sehingga para anggota PKH tidak perlu lagi mengantri di kantor pos dan dapat membelanjakan uang bantuan tersebut di e-warong untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 4. Indikator terendah adalah keterbukaan, yang artinya masih ada anggota PKH yang belum mengetahui alasan kartu mereka yang belum di ganti.

			5. Humas Kemneterian Sosial dalam mempublikasikan program e-warong telah mampu meng-*counter* pendapat umum, dengan mempublikasikan informasi mengenai pelaksanaan program e-warong.
3.	Totalitas Inoto Gulo (Skripsi, Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018)	Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli	Hasil penelitian menunjukkan bhawa: 1. Penerimaan data/rangsangan terhadap program e-Warong KUBE PKH mendapat nilai 0,88 adalah berpersepsi positif. 2. Proses menyeleksi data/rangsangan terhadap program e-Warong KUBE PKH mendapat nilai 0,86 adalah berpersepsi positif. 3. Pengorganisasian data/rangsangan terhadap e-Warong KUBE PKH

			mendapat nilai 0,76 adalah berpersepsi positif. 4. Penafsiran data terhadap program e-Warong KUBE PKH mendapat nilai 0,73 adalah berpersepsi positif. 5. Pengecekan data program e-Warong KUBE PKH dengan jumlah 0,81 adalah berpersepsi positif. 6. Proses reaksi (memberi kesimpulan) terhadap program e-Warong KUBE PKH dengan jumlah rata-rata 0,72 adalah berpersepsi positif. Berdasarkan dari keenam kategori/komponen di atas, dapat dilihat nilai rata-rata persepsi responden terhadap pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH di Kecamatan

			Gunungsitoli Kota Gunungsitoli adalah positif yaitu dengan nilai 0,79.
4.	Jakra Hadepa Riyadi,S.Sos, (Tesis, Pekerjaan Sosial, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, 2019)	Penanggulangan Kemiskinan Berbasis E-Warong Program Keluarga Harapan (Studi E-Warong KUBE Mugi Barokah Desa Klopogodo Kec. Gombong Kab. Kebumen Prov.Jawa Tengah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penanggulangan kemiskinan berbasis E-Warong KUBE PKH Mugi Barokah dilaksanakan dengan sebuah *management* organisasi kewirausahaan dimulai dari, yaitu: 1. Tahap *planning*, tahap awal dalam penentuan peserta, penentuan tempat, pengadministrasian, dan penyamaan tujuan pembentukan E-Warong. 2. Tahap *organizing*, pembentukan tugas pokok masing-masing bidang. 3. Tahap *actuating*, menggerakkan organisasi melalui peran sentral dari

			seorang ketua E-Warong. 4. Tahap *controlling*, pengawasan dan evaluasi oleh supervisor E-Warong. Dalam pemberdayaan E-Warong, pendamping sosial PKH sebagai pelaku pemberdaya memiliki peran sebagai *fasilitator*, yaitu memfasilitasi E-Warong dari awal pembentukan sampai dengan terbentuknya E-Warong. *Broker*, yaitu bertindak sebagai *mediator role* dan *manager* kasus. *Advokator*, yaitu mengadvokasi E-Warong untuk diakui secara legal di pemerintahan desa Klopogodo dan kecamatan Gombong, dan peran *edukator* yaitu membangkitkan

			kemauan anggota E-Warong untuk berubah dengan bimbingan modul ekonomi pada Pertemuan Peningkatan Kemauan Keluarga (P2K2).
5.	Akhmad Marhadi (Jurnal Etnoreflika, Volume 6 No. 3, 2017)	Profil Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) KUBE PKH Sebagai Alternatif Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. 25 E-Warong KUBE PKH di Provinsi Sulawesi Tenggara belum berfungsi secara optimal. E-Warong umumnya hanya berfungsi sebagai tempat menjual bahan pangan pokok saja, tetapi fungsi lainnya belum berjalan optimal sebagaimana amanah Permensos Nomor 25 Tahun 2016. 2. Semua E-Warong telah memenuhi syarat pembentukan yang diamanahkan Permensos tersebut.

			3. Penggunaan EDC hanya dapat dilakukan oleh 12 E-Warong di Kota Bau-Bau. 4. Semua E-Warong memiliki karakteristik keanggotaan yang telah sesuai Permensos. Namun demikian tidak semua anggota E-Warong memiliki keterampilan yang dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan KUBE jasa ini. 5. Semua E-Warong di Kota Bau-Bau menggunakan dana BPSU dan dana bantuan Kendari belum optimal. 6. Pasokan bahan pangan pokok yang disediakan oleh E-Warong di Kota umumnya mereka peroleh dari *supplier*

			non bulog, yakni dari toko-toko bahan pangan grosir yang banyak ditemukan di Kota Bau-Baudan Kota Kendari. 7. Semua E-Warong belum dapat melayani pencairan dana bantuan sosial non tunai.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal, yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Delfi Ulan Dari yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai E-Warong KUBE PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Delfi Ulan Dari berlokasi di Kota Medan, sedangkan peneliti ini meneliti di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Radita Husnaini yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai E-Warong KUBE PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Radita Husnaini berlokasi di Kota Jakarta, sedangkan peneliti ini meneliti di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Totalitas Inoto Gulo yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai E-Warong KUBE

PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Totalitas Inoto Gulo berlokasi di Kota Gunungsitoli, sedangkan peneliti ini meneliti di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Jakra Hadepa Riadi yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai E-Warong KUBE PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Jakra Hadepa Riadi di Desa Klopogodo Kec. Gombong Kab. Kebumen Prov.Jawa Tengah, sedangkan peneliti ini meneliiti di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Akhmad Marhadi yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai E-Warong KUBE PKH. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Akhmad Marhadi berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan penelitian ini meneliti di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi di E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Judul tersebut dipilih karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan E-Warong KUBE PKH serta mengevaluasi pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH apakah sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH tersebut. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan November 2019 sampai Februari 2020.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat *holistik* (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian ini tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*aktivity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini dalam konteks bisnis misalnya tempat penjalan, orang-orang yang ada dalam tempat penjualan tersebut dan aktivitasnya.[43]

Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif dengan studi bentuk

[43]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*) (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 376.

lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang ikut tergabung dalam E-Warong KUBE PKH serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.[44]

Pemilihan *purposive sampling* karena obyek dan subyek penelitian sudah ditentukan oleh peneliti. Peneliti sudah mengetahui sasaran yang bisa memberikan data dan informasi untuk penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perempuan yang sudah menikah dan memenuhi syarat sasaran dari program E-Warong KUBE PKH. Pada penelitian ini jumlah keseluruhan anggota E-Warong KUBE di tiga desa tersebut yaitu 30 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yang mana

[44]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

responden berjumlah 9 orang yang masing-masing diambil 3 orang dari setiap desa.

D. Sumber Data

Sejalan dengan penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti wawancara dan observasi.[45] Jadi sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah tanggapan responden melalui wawancara, serta observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[46] Dalam penelitian ini, dokumentasi dan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai penunjang kelengkapan penelitian ini merupakan sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan

---

[45]Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), hlm. 53.
[46]Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 94.

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[47]

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpul data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Observasi lapangan

Teknik pengumpulan data ini adalah melakukan pengamatan peneliti terhadap objek penelitian sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi yang sebenarnya. Informasi didapatkan dengan mendatangi langsung atau melakukan pengamatan di E-Warong KUBE PKH Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.[48] Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (*proton* dan *elektron*) maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan melakukan dialog untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai strategi yang dilakukan untuk perkembangan E-Warong Kube PKH.

---

[47]Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 401.
[48]Sugiyono, *Op.,Cit*, hlm. 403.

Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Penggunaan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban atas hipotesis. Semua subjek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.[49]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.[50]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpuan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada

[49]Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 138.

[50]Sugiyono, *Op.,Cit*, hlm. 329.

konsep Miles dan Huberman yaitu interactive model yang mengklasifiasikan analisis data dalam tiga langkah.

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape*, terlihat lebib banyak kata-kata daripada angka.[51]

Peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu:[52]

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

   Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data "mentah" yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

   Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. **Penyajian Data (*Data Display*)**

   Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Namun dengan melihat tayangan atau data display dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan membantu pula dalam melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang bersangkutan.

---

[51]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 407.

[52]*Ibid*, hlm. 408

Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

3. Penarikan Kesimpulan (*verifikasi*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[53]

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin kebasahan data dalam penelitian inni, peneliti berpedoman kepada pendapat Lexy Moeleong, yang dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayan data yang dikumpulan. Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun kelokasi penelitian

[53]Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 345.

guna mendeteksi dan memperhitungkan distori yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

Bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan (observasi) dan dokumen. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Adapun cara membandingkan hal observasi dan wawancara atau pengecekan kembali dengan mewawancarai informan penelitian kembali kelapangan guna memverifikasi ulang hasil wawancara.[54]

Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, ada beberapa macam yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

[54]Lexy J. Moeleong, *Op.,Cit.*, hlm. 324.

b. Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

d. Triangulasi teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.[55]

Dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain, penggunaan metode triangulasi ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contohnya, data hasil wawancara perlu didukung denngan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung

[55]*Ibid*., hlm. 326.

oleh foto-foto, dan dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, antara bab satu dan bab selanjutnya saling berkaitan.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan isi pembahasan. Pada bab pertama berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti. Kerangka berpikir digunakan untuk memperjelas pembaca tentang variabel-variabel penelitian.

Bab *ketiga*, berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan, lokasi penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab *keempat*, menyajikan hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab *kelima*, penutupan yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan

masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah fokus penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Padangsidimpuan

1. Sejarah Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan yang dikenal dengan sebutan "*Kota Dalihan na Tolu*" dengan semboyan "*Salumpat Saindege*" terletak di Propinsi Sumatera Utara. Kota ini mempunyai luas wilayah 146.85 km^2 terdiri atas 6 kecamatan. Keenam kecamatan tersebut adalah Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan Angkola Julu. Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah 14,09 km^2, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan dengan luas wilayah 15,81 km^2, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan luas wilayah 38,74 km^2, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas wilayah 22,34 km^2, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas wilayah 27,69 km^2 dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas wilayah yaitu 28,18 km^2.[54]

Nama kota ini berasal dari "*Padang na dimpu*" (padang = hamparan luas, na = di, dan dimpu = tinggi) yang berarti "*hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi*." Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah,

[54]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidimpuan Semester* 1 *Tahun* 2019, Padangsidimpuan jl. Cempaka No.5, 2019, hlm. 6.

pedagang ikan dan garam dari Sibolga – Padangsidimpuan – Panyabungan, Padang Bolak (Paluta) – Padangsidimpuan – Sibolga.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik, dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padangsidimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat Kota Padangsidimpuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah Kota Padangsidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padangsidimpuan di sebuah museum di Kota Leiden, Belanda. Melalui aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 kota Administratif Padangsidimpuan diusulkan menajdi Kota Madya Tk.II, maka melalui:

a. Surat Bupati Tapanuli Selatan No. 135/1078/2000 tanggal 30 Nopember 2000.

b. Kep. DPRD Tapanuli Selatan No. 01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001 serta

c. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 135/1595/2001 tanggal 5 Februari 2001 maka diusulkan pembentukan Kota Padangsidimpuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

2. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan terletak ada posisi 01° 08’ 00” – 01° 28’ 19” Lintang Utara dan 99° 13’ 00” – 99° 20’ 00” Bujur Timur. Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota sedang yang terletak di Propinsi Sumatera Utara dan berada pada posisi sebelah selatan Kota Sibolga yang berjarak 88 Km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam melalui jalan darat. Sedangkan jarak Kota Padangsidimpuan dengan Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara adalah 389 Km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam melalui jalan darat.[55] Kota Padangsidimpuan terletak antara 260-1100 meter diatas permukaan laut (DPL). Kota Padangsidimpuan berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

[55]*Ibid*, hlm. 7.

c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota Medan, Sibolga, dan Kota Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera.

Topografi wilayahnya yang berupa lemah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang dikelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan disebelah Utara kota. Salah satu puncak Bukit yang terkenal di kota Padangsidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak suangai yang melintasi kota ini, antara lain Sungai Batang Ayumi dan Aek Sibontar.

B. Gambaran Umum Tentang E-Warong KUBE PKH

1. Sejarah E-Warong KUBE PKH

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah

Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.[56]

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Pada 2013, Kemensos dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) bersepakat untuk mensinergikan sumber daya para pihak terkait dalam rangka memberdayakan Kube dan Koperasi. Kerja sama ini bertujuan melakukan pembinaan dan pengembangan Kube agar kelembagaannya dapat berstatus koperasi. Beberapa upaya yang akan dilakukan bersama, yaitu:

a. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk bimbingan keterampilan kewirausahaan.
b. Peningkatan akses sumber pembiayaan/keuangan
c. Peningkatan status kelembagaan Kube menjadi koperasi.

Kesepakatan tersebut mengatur tanggung jawab masing-masing kementerian. Kemensos bertanggung jawab atas:[57]

---

[56]Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2019*, hlm. 9.

[57]M.Sulton Mawardi dkk, *Kajian Awal Pelaksana Program E-Warong Kube-PKH*, hlm. 8.

a. Memfasilitasi pembentukan, pelatihan, pembinaan, pendampingan dan penyuluhan Kube.
b. Melakukan pembinaan teknis pengembangan kelembagaan, sosial, dan ekonomi kube secara berkelnajutan.
c. Melakukan inventarisasi dan pendataan Kube untuk memenuhi persyaratan status kelembagaan menjadi koperasi.

Sementara itu, Kemenkop dan UKM bertanggung jawab atas:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, memfasilitasi pembentukan koperasi bagi Kube yang memenuhi syarat.
b. Meningkatkan kualitas tata laksana pengelolaan koperasi.
c. Meningkatkan akses koperasi ke sumber daya produktif.

Sejalan dengan kesepakatan tersebut, dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuanngan Inklusif pada 26 April 2016, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk segera merumuskan strategi nasional keuangan inklusif berbasis digital. Dalam kaitan ini, setiap bansos dan subsidi harus disalurkan secara nontunai menggunakan sistem perbankan dengan tujuan memudahkan pengawasan dan sekaligus memperluas keuangan inklusif. Untuk itu, penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan bansos dan subsidi agar diintegrasikan ke dalam satu kartu.

Menindaklanjuti hasil rapat kabinet terbatas itu, Mensos kemudian mendorong sinergi antar program penanganan kemiskinan agar hasilnya mampu memberikan dampak luas, efektif, dan efisien. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah memberdayakan pendamping dan masyarakat

yang didampinginya, dan menjadikan mereka sebagai pelaku sistem keuangan inklusif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bansos dan subsidi. Untuk mencapai tujuan itu, proses pengembangan Kube harus dikerjakan secara holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sistem prfoduksi, sampai pada pemasaran produknya.

2. Tujuan E-Warong KUBE PKH

Adapun tujuan E-Warong KUBE PKH melalui Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) sebagai penanganan fakir miskin perkotaan bagi anggota KUBE dan peserta Rastra dan penerima PKH yaitu bertujuan untuk:[58]

a. Sebagai tempat pemasaran produk-produk KUBE dan hasil usaha peserta PKH dan Rastra.
b. Menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota KUBE, Rastra dan peserta PKH.
c. Menyediakan transaksi keuangan secara elektronik, baik untuk pencairan bantuan sosial, pembelian dan pembayaran lainnya.

3. Rancangan Program

Kemensos menginisiasi program E-Warong untuk menyalurkan bansos dan subsidi dengan sistem non tunai. Sebagai kios, E-Warong adalah sarana yang didirikan dan dikelola secara gotong royong dengan

[58]Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan E-Warong KUBE*, hlm. 5.

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).[59] E-Warong dirancang sebagai tempat menjual bahan pangan pokok dan barang yang diproduksi Kube dengan sistem transaksi non tunai menggunakan jaringan internet. Permensos (Peraturan Menteri Sosial) No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui E-Warong menyebutkan fungsi E-Warong sebagai:

a. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga.
b. Agen bank penyalur bansos non tunai.
c. Tempat pemasaran hasil produksi Kube.
d. Tempat layanan koperasi simpan pinjam.

Selain Kemensos dan jajaran teknis terkait, pemangku kepentingan utama yang berperan dalam pelaksanaan program ini adalah KMIS, bank mitra, bulog, dan kube jasa. Secara garis besar, masing-masing pemangku kepentingan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Kemensos

Dalam program E-Warong, Kemensos (Ditjen PFM) bertindak sebagai penanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan program.

b. KMIS

KMIS merupakan koperasi primer yang beranggotakan para peserta PKH. Secara resmi KMIS berdiri pada 5 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.

[59]M.Sulton Mawardi dkk, *Op.,Cit.*, hlm. 8 .

001782/BH/M.KUKM.2/VIII/2016. Kemensos memberikan mandat kepada KMIS untuk mengelola E-Warong. KMIS pada dasarnya dirancang untuk keperluan penerima bansos dan subsidi melalui kerja sama dengan kube jasa. Untuk itu, KMIS melakukan kontrak kerja sama dengan distributor dalam menyediakan bahan pangan pokok (dalam hal ini Bulog) yang akan dipasarkan melalui E-Warong. Selain itu, dalam rangka memperluas inklusi keuangan dan mengembangkan transaksi non tunai di E-Warong, KMIS harus bekerja sama dengan Penghimpunan Bank Negara (Himbara) sebagai bank mittra. KMIS juga mendapat tugas memberdayakan penerima bansos dan subsidi agar memiliki jiwa kewirausahaan, berlaku hemat, dan disiplin, serta membantu mempersiapkan standarisasi produk Kube Produksi.[60]

c. Bank Mitra

Dalam penyaluran bansos dan subsidi non tunai, program E-Warong mendapat dukungan Himbara dengan menggunakan teknologi berbasis situs web dan e-wallet (dompet elektronik). Bantuan ini diberikan bank anggota Himbara melalui kontrak kerja sama dengan KMIS. Melalui kerja sama ini, Kube Jasa akan menjadi agen bank dan dapat memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas jaminan rekomendasi KMIS. Sebagai agen bahwa sebagai agen bank BNI, E-Warong dapat melakukan fungsi pembukaan rekening, setoran dan tarik tunai, pembelian (pulsa) dan pembayaran (listrik dan air) bagi penerima

[60]*Ibid*, hlm. 9.

bansos dan masyarakat umum. Dalam kaitannya dengan program E-Warong, bank menjamin tersalurnya bansos dan subsidi kepada penerima secara tepat sasaran berdasarkan data yang disediakan Kemensos.

d. Kube Jasa

Dalam rancangannya, pemilik dan pengelola E-Warong adalah Kube Jasa (kelompok ini merupakan kelompok bentukan baru yang khusus dibuat untuk program E-Warong) yang terdiri atas tiga orang pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan tujuh anggota penerima bansos dan seorang supervisor. Kesepuluh orang tersebut wajib bersepakat melalui perjanjian formal di antara mereka untuk menentukan lokasi E-Warong dan menunjuk pengelolanya. Anggota Kube Jasa adalah mereka yang bertempat tinggal di sekitar lokasi E-Warong. Mereka bertanggung jawab atas keberlangsungan operasi E-Warong dan memelihara hubungan baik dengan Kube lain. Secara sukarela, anggota Kube Jasa menjadi anggota KMIS dan dalam mengelola stok barang dan lalu lintas transaksi kauangan bertanggung jawab kepada KMIS.

Kriteria pembentukan E-Warong yang tercantum dalam Permensos yaitu:[61]

1. Lokasi E-Warong terkoneksi dengan jaringan internet dan jaringan listrik.
2. E-Warong melayani 500 sampai 1.000 keluarga penerima manfaat bansos.

[61]*Ibid*, hlm. 10.

3. E-Warong menggunakan tempat/rumah pengurus Kube Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota Kube
4. E-Warong melaksanakan transaksi bansos secara tunai.

e. Bulog

Distributor yang sejauh ini diperankan oleh Bulog merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyediakan bahan pangan pokok dalam jumlah dan mutu terjamin, dan dengan harha terjangkau. Dalam melaksanakan tugasnya, distributor bekerja sama dengan KMIS dan bank melalui perjanjian formal untuk mengembangkan sistem pasokan dan pembayaran yang efektif dan efisien. Pemesanan barang dilakukan secara terpusat oleh KMIS untuk disalurkan ke E-Warong dengan harga lebih murah daripada harga warung di sekitarnya.

Berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Secara garis besar, mekanisme kerja pelaksanaan program E-Warong berdasarkan prosesnya yaitu: [62]

1. Kemensos memberikan data pemerima PKH kepada bank mitra dan KMIS.
2. Bank mitra membuka rekening, menerbitkan KKS, dan mendistribusikannya kepada masing-masing peserta PKH.
3. Kemensos mentransfer dana PKH kepada bank mitra dan bank mitra kemudian menyalurkannya ke rekening masing-masing peserta PKH.

[62] *Ibid*, hlm. 11.

4. KMIS memesan barang kepada bulog atau distributor lain, dan kemudian melakukan pembayaran kepada mereka.
5. Bulog mendistribusikan pesanan barang dari KMIS kepada masing-masing E-Warong.
6. Peserta PKH mencairkan bansos nontunai di lokasi E-Warong.
7. Selain sebagai titik distribusi bansos nontunai, E-Warong juga dapat bekerja sama dengan Kube Produksi dalam memasarkan produknya di E-Warong.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan E-Warong, struktur organisasi E-Warong KUBE PKH yaitu sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
c. Bendahara merangkap anggota
d. Anggota

Gambar 4.1
Struktur Organisasi E-Warong KUBE PKH

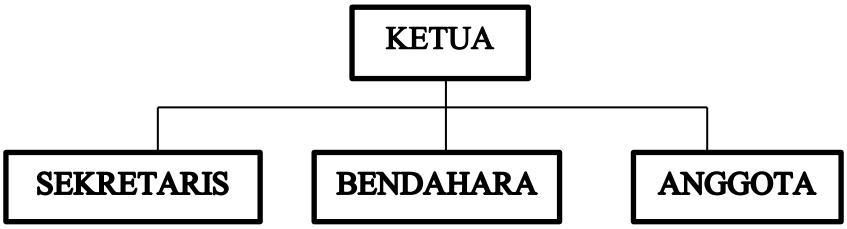

Sumber: *E-Warong KUBE PKH* Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

C. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan E-Warong Kube PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Pelaksana kegiatan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) melalui E-Warong KUBE penanganan fakir miskin perkotaan bagi anggota KUBE, penerima Raskin, dan peserta PKH adalah, sebagai berikut:

a. Kementerian Sosial
b. Dinas Sosial Provinsi
c. Dinas Sosial Kabupaten/Kota
d. Bulog dan Distributor lainnya
e. Perbankan
f. Koperasi
g. Pendamping Sosial/Pendamping PKH

Pelaksana dan pengelola E-Warong KUBE penanganan fakir miskin perkotaan adalah anggota KUBE jasa, yang anggotanya berasal dari peserta PKH dan penerima Raskin/Rastra ditetapkan oleh Dinas Sosial Kab/Kota.[63]

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Adapun petunjuk pelaksanaan diuraikan sebagai berikut:

1. Melayani pencairan bantuan sosial nontunai

[63]Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan E-Warong KUBE*, hlm. 15.

2. Melayani bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial
3. Melayani pembayaran telepon, listrik dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum
4. Memasarkan hasil produksi KUBE
5. Menjadi agen bank yang bekerjasama dalam penyaluran bantuan sosial nontunai
6. Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu

a. Desa Salambue

Desa Salambue merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas wilayah 87,99 Ha. Secara administratif Desa Salambue terdiri dari 3 lingkungan. Adapun batas-batas Desa Salambue adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pal IV PK

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sigulang

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

Salah satu desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yang sudah seharusnya mendapatkan bantuan sosial bersyarat. Hal ini diperkuat dengan data kependudukan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk : 2.246 Jiwa

Jumlah Penduduk Dewasa : 1.846 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 554 Jiwa

Jumlah Laki-laki : 1.103 Jiwa

Jumlah Perempuan : 1.143 Jiwa

Jumlah Penduduk Miskin : 188 Jiwa

Dalam hal ini pihak Kemensos turut dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang dinamakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mensejahterakan mereka, selain bantuan pangan pokok pihak Kemensos mencetuskan suatu program kepada KPM yang disebut sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk penurunan angka kemiskinan yang telah direncanakan sebelumnya. Program ini menawarkan suatu program yang dinamakan E-Warong KUBE sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat miskin.

Pihak Kemensos memberikan arahan kepada Desa Salambue untuk mendirikan E-Warong KUBE PKH yang diberi nama E-Warong KUBE Serasi yang berdiri pada tahun 2017, namun mulai aktif pada tahun 2018. E-Warong KUBE beranggotakan 10 orang yang bertanggungjawab untuk mengelola E-Warong KUBE tersebut, yang terdiri dari:

1. Ketua : Idar Siregar
2. Sekretaris : Maimunah
3. Bendahara : Zakiah Hanum
4. Anggota : - Emma
   - Laila
   - Erlina

- Mahrani Lubis
- Elmi
- Mardiah
- Asmala

Pelaksanaan Program E-Warong KUBE di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara khususnya di Desa Salambue secara teknis sudah memenuhi standar petunjuk pelaksana, namun secara pengaplikasian di lapangan belum sesuai dengan pencapaian yang diinginkan.

Peneliti memperoleh hasil observasi bahwa dari 10 orang yang bertanggungjawab untuk mengelola E-Warong, yang mampu untuk menjalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE hanya beberapa orang saja.[64]

Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti kepada beberapa anggota PKH di Desa Salambue yang terkait dengan beberapa hal:

1. Penggunaan mesin gesek untuk melayani pencairan bantuan sosial nontunai, pembayaran telepon, listrik dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum serta menjadi agen bank dalam penyaluran bantuan sosial nontunai.

   Hasil wawancara dengan Ibu Idar mengatakan bahwa terkait dengan pencairan bantuan sosial nontunai, anggota PKH menggunakan mesin gesek sebagai sarana pencairan dana, setiap

[64]Hasil Observasi di Desa Salambue, pada tanggal 03 Februari 2020.

anggota PKH akan datang kewarung untuk mencairkan bantuan dengan membawa kartu bantuan.[65]

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ibu Zakiah yang mengatakan bahwa untuk pembayaran telepon, listrik dan air serta layanan agen bank dalam penyaluran bantuan sosial, baik untuk penerima bantuan sosial ataupun masyarakat umum pihak PKH tidak menggunakan mesin gesek, dan bahkan jarang sekali digunakan. Namun untuk pelayanan pengiriman uang atau transfer, bisa dilakukan oleh pihak E-Warong.[66]

2. Penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial

Terkait dengan layanan ini, hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa e-Warong Kube telah menyediakan bahan pangan pokok lebih murah (harga grosir) dibandingkan dengan warung yang lain. Pemberian harga ini dimaksudkan untuk meringankan masyarakat khususnya anggota penerima bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Idar yang menerangkan bahwa harga di warung ini lebih murah dibandingkan dengan harga diwarung lain dan hampir sama dengan

---

[65]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 03 Februari 2020.

[66]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 03 Februari 2020.

harga yang ada di grosir yang menyebabkan terjadinya perselisihan dengan warung lain, karena adanya perbedaan harga[67]

Terkait dengan pernyataan wawancara di atas, bahwa tidak semua masyarakat bisa menerima kehadiran E-Warong KUBE di desa tersebut, karena akan selalu ada perselisihan dengan pedagang lain, namun disini program ini hanya bertujuan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan diberikannya harga yang lebih murah.

Anggota PKH yang terlebih dahulu diharuskan berbelanja di warung ini dengan alasan yang diberikan anggota PKH sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Zakiah yang mengatakan bahwa anggota PKH diwajibkan belanja di warung ini walaupun hanya satu barang ketika pencairan untuk lebih melancarkan program E-Warong KUBE PKH.[68]

Pernyataan yang sama juga dituturkan Ibu Zakiah yang menyatakan bahwa selain anggota PKH, masyarakat umum juga ada yang berbelanja di warung ini.[69]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa anggota PKH lah yang lebih berperan penting dalam kemajuan E-Warong tersebut, meskipun adanya perselisihan dengan pedagang lain bahkan ada juga

---

[67]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 03 Februari 2020.

[68]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 03 Februari 2020.

[69]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 03 Februari 2020.

yang tidak menerima keberadaan warung ini, tapi masyarakat lain juga ada yang berbelanja di warung ini.

3. Memasarkan hasil produksi KUBE

Dalam hal petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE bahwa anggota PKH yang bertanggungjawab dalam pengelolaan E-Warong diharapkan mampu menghasilkan produksi sendiri yang akan di pasarkan untuk masyarakat umum, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan anggota PKH, di warung ini belum melakukan hal tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan program E-Warong dengan berbagai alasan.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Idar (anggota PKH) beliau mengatakan bahwa jenis usaha yang dijalankan di E-Warong ini adalah sembako, dan anggota PKH tidak memasarkan produk hasil olahan sendiri karena keterbatasan waktu dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing.[70]

4. Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lila (anggota PKH) mengatakan bahwa untuk memudahkan dalam proses penjualan, anggota PKH mengemas ulang produk yang akan di jual seperti gula, minyak dan tepung supaya terlihat lebih rapi dan bersih.[71]

---

[70]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 04 Februari 2020.

[71]Hasil wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 04 Februari 2020.

Tujuan dilakukannya hal tersebut untuk memudahkan anggota dalam pemasaran produk, sarana di warung juga dilengkapi dengan timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan pangan pokok dan juga disediakan rak untuk penempatan bahan pangan tersebut supaya terlihat lebih rapi dan bersih.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan bahwa pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Desa Salambue belum terlaksana dengan maksimal.

b. Desa Huta Koje

Desa Huta Koje merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas wilayah 34 Ha. Adapun batas-batas Desa Salambue adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pijorkoling

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pijorkoling

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Huta Limbong

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Huta Padang

Salah satu desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yang sudah seharusnya mendapatkan bantuan sosial bersyarat. Hal ini diperkuat dengan data kependudukan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk : 853 Jiwa

Jumlah Penduduk Dewasa : 436 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 218 KK

Jumlah Laki-laki : 426 Jiwa

Jumlah Perempuan : 427 Jiwa

Jumlah Penduduk Miskin : 387 Jiwa

Dalam hal ini pihak Kemensos turut dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang dinamakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mensejahterakan mereka, selain bantuan pangan pokok pihak Kemensos mencetuskan suatu program kepada KPM yang disebut sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk penurunan angka kemiskinan yang telah direncanakan sebelumnya. Program ini menawarkan suatu program yang dinamakan E-Warong KUBE sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat miskin.

Atas arahan dari pihak Dinas Sosial, Desa Huta Koje mampu mendirikan E-Warong KUBE PKH yang diberi nama E-Warong KUBE Melati yang berdiri pada tahun 2017, namun mulai aktif pada tahun 2018. E-Warong KUBE beranggotakan 10 orang yang bertanggungjawab untuk mengelola E-Warong KUBE tersebut, yang terdiri dari:

1. Ketua : Surianti
2. Sekretaris : Arbia
3. Bendahara : Ernawati
4. Anggota : - Ita Hasanah
   - Megawari
   - Ani
   - Nurlela

- Rosna
- Sari Banun
- Linda

Selain Desa Salambue, Desa Huta Koje juga termasuk Desa yang diberikan kesempatan untuk pengadaan E-Warong KUBE di tengah-tengah masyarakat, dimana pelaksanaan program E-Warong jika dilihat secara teknis sudah terlaksana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program E-Warong KUBE, akan tetapi dalam pengaplikasiannya secara nyata belum terealisasikan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa tidak semua anggota PKH mampu mengaplikasikan program sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota PKH di Desa Huta Koje terkait dengan beberapa hal, yaitu:

1. Penggunaan mesin gesek untuk melayani pencairan bantuan sosial nontunai, pembayaran telepon, listrik dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum, serta menjadi agen bank dalam penyaluran bantuan sosial nontunai.

   Hasil wawancara dengan anggota PKH Ibu Surianti mengatakan bahwa mesin gesek hanya digunakan ketika pencairan, sementara untuk transfer atau pengiriman uang masih jarang dilakukan karena keterbatasan modal.[72]

[72]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 04 Februari 2020.

Pernyataan yang sama dipaparkan oleh Ibu Sari Banun sesuai hasil wawancara yang mengatakan bahwa untuk pembayaran telepon, listrik, air, dan menjadi agen bank dalam penyaluran bantuan sosial, baik untuk penerima bantuan sosial maupun masyarakat umum pihak PKH tidak melakukannya.[73]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, anggota PKH yang bertanggungjawab untuk mengelola warung masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman di bidang teknologi, yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam melakukan aktivitas menggunakan mesin gesek tersebut.

2. Penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial

Sama halnya dengan Desa Salambue, bahwa e-Warong Kube di Desa Huta Koje juga telah menyediakan bahan pangan pokok lebih murah (harga grosir) dibandingkan dengan warung yang lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Surianti yang mengatakan bahwa jenis usaha yang dijalankan di E-Warong KUBE PKH di desa ini adalah sembako dan untuk harga di warung ini hampir sama dengan harga grosir, jadi lebih murah dibandingkan dengan harga di warung lain. Masyarakat umum juga ada yang berbelanja di warung ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[74]

---

[73]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 09 Februari 2020.

[74]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 04 Februari 2020.

Hal yang sama juga dikatakan dengan anggota PKH yang lain berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosna mengatakan bahwa ketika pencairan dana bantuan semua anggota PKH diwajibkan untuk belanja di warung ini walaupun hanya satu barang, tujuannya untuk kemajuan warung.[75]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, warung ini sangat membantu anggota PKH untuk mensejahterakan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga yang ditawarkan E-Warong di desa ini cukup murah dan harganya disamakan dengan harga grosir dan anggota PKH juga diwajibkan untuk berbelanja di warung tersebut ketika pencairan dana bantuan.

3. Memasarkan hasil produksi KUBE

Dalam hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksana E-Warong KUBE yang diharuskan untuk menghasilkan produksi malah tidak sesuai dengan yang diharapkan karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut tidak terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Surianti mengatakan bahwa anggota PKH juga memiliki pekerjaan lain selain bertanggungjawab di warung ini, jadi anggota PKH di warung ini tidak memproduksi hasil olahan sendiri karena keterbatasan waktu.[76]

---

[75]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 09 Februari 2020.

[76]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 04 Februjari 2020.

4. Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu

Dalam hal ini, pengemasan bahan pangan pokok akan memudahkan dalam hal penjualan atau pemasaran bahan pangan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sari Banun mengatakan bahwa anggota PKH melakukan pengemasan ulang produk yang akan dijual untuk memudahkan dalam proses pemasaran seperti minyak, tepung, dan gula.[77]

Tujuan dilakukannya hal tersebut untuk memudahkan anggota dalam pemasaran produk, sarana di warung juga dilengkapi dengan timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan pangan pokok dan juga disediakan rak untuk penempatan bahan pangan tersebut supaya terlihat lebih rapi dan bersih.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan bahwa pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Desa Huta Koje belum terlaksana dengan maksimal.

c. Desa Labuhan Rasoki

Desa Labuhan Rasoki merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas wilayah 53 Ha. Adapun batas-batas Desa Salambue adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Perkebunan PK

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tarutung Baru

[77]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 09 Februari 2020.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Perkebunan PK

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Manunggang Jae

Salah satu desa yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi yang sudah seharusnya mendapatkan bantuan sosial bersyarat. Hal ini diperkuat dengan data kependudukan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk : 1.852 Jiwa

Jumlah Penduduk Dewasa : 994 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 489 KK

Jumlah Laki-laki : 933 Jiwa

Jumlah Perempuan : 919 Jiwa

Jumlah Penduduk Miskin : 1.063 Jiwa

Dalam hal ini pihak Kemensos turut dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang dinamakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mensejahterakan mereka, selain bantuan pangan pokok pihak Kemensos mencetuskan suatu program kepada KPM yang disebut sebagai Program Keluarga Harapan (PKH).

Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk penurunan angka kemiskinan yang telah direncanakan sebelumnya. Program ini menawarkan suatu program yang dinamakan E-Warong KUBE sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat miskin.

Dalam hal ini, atas arahan dari pihak Dinas Sosial, Desa Labuhan Rasoki mampu mendirikan E-Warong KUBE PKH yang diberi nama E-Warong KUBE Bersama yang berdiri pada tahun 2017, namun mulai

aktif pada tahun 2018. E-Warong KUBE beranggotakan 10 orang yang bertanggungjawab untuk mengelola E-Warong KUBE tersebut, yang terdiri dari:

1. Ketua : Rotua Hutabarat
2. Sekretaris : Heni Mariati
3. Bendahara : Masrida
4. Anggota : - Debora
   - Nurlinda
   - Sovia
   - Dermawati
   - Rohana
   - Herlina
   - Masni

Desa Labuhan Rasoki juga merupakan desa yang diberikan amanah untuk menjalankan program E-Warong KUBE PKH, sama halnya dengan Desa Salambue dan Desa Huta Koje, hadirnya E-Warong KUBE PKH memberikan dampak yang begitu baik khususnya kepada anggota PKH, karena dengan adanya program ini, anggota PKH terbantu dari segi ekonomi, biaya anak sekolah, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Namun sama halnya dengan Desa Salambue dan Des Huta Koje, Desa Labuhan Rasoki juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan program E-Warong KUBE, namun berdasarkan hasil wawancara dengan

beberapa anggota PKH, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengaplikasiannya belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota PKH di Desa Huta Koje terkait dengan beberapa hal, yaitu:

1. Penggunaan mesin gesek untuk melayani pencairan bantuan sosial nontunai, pembayaran telepon, listrik dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum serta menjadi agen bank dalam penyaluran bantuan sosial nontunai.

   Hasil wawancara dengan anggota PKH, Ibu Masrida mengatakan bahwa mesin gesek yang ada di warung ini hanya digunakan ketika pencairan dana bantuan, sementara untuk transfer atau pengiriman uang pihak E-Warong tidak melakukannya karena keterbatasan modal.[78]

   Pernyataan yang sama dipaparkan oleh Ibu Heni Mariati sesuai hasil wawancara yang mengatakan bahwa untuk pembayaran telepon, listrik dan air serta menjadi agen bank dalam penyaluran bantuan sosial non tunai, baik untuk penerima bantuan sosial ataupun masyarakat umum pihak E-Warong di desa ini tidak melakukannya.[79]

   Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, anggota PKH yang bertanggungjawab untuk mengelola

[78]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

[79]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

warung masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman di bidang teknologi, yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam melakukan aktivitas menggunakan mesin gesek tersebut.

2. Penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial

Sama halnya dengan Desa Salambue dan Desa Huta Koje, E-Warong KUBE PKH di Desa Labuhan Rasoki juga telah menyediakan bahan pangan pokok lebih murah (harga grosir) dibandingkan dengan warung yang lain.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Masrida yang mengatakan bahwa jenis usaha di warung ini adalah sembako dan untuk harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di warung lain yang hampir sama dengan harga grosir yang tujuannya untuk membantu masyarakat dan anggota PKH memenuhi kebutuhan sehari-hari.[80]

Hal yang sama juga dikatakan dengan anggota PKH yang lain berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Debora mengatakan bahwa ketika pencairan bantuan berupa bahan pangan seperti beras, telor, dan juga kacang hijau, semua anggota PKH dapat mengambilnya di warung ini. Di warung ini juga anggota PKH diharuskan untuk berbelanja khususnya ketika pencairan dana bantuan.[81]

---

[80]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

[81]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, warung ini sangat membantu anggota PKH untuk mensejahterakan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga yang ditawarkan E-Warong di desa ini cukup murah dan harganya disamakan dengan harga grosir dan anggota PKH juga diwajibkan untuk berbelanja di warung tersebut ketika pencairan dana bantuan.

3. Memasarkan hasil produksi KUBE

Dalam hal petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE bahwa anggota PKH yang bertanggungjawab dalam pengelolaan E-Warong di harapkan mampu menghasilkan produksi sendiri yang akan di pasarkan untuk masyarakat umum, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan anggota PKH, di warung ini belum melakukan hal tersebut sesuai petunjuk pelaksanaan program E-Warong dengan berbagai alasan.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Heni Mariati yang mengatakan bahwa selain menjadi anggota PKH yang bertanggungjawab di warung ini, para anggota PKH tidak bisa hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja, itulah sebabnya diluar menjadi anggota PKH mereka juga memiliki usaha ataupun pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itulah sebabnya

warung ini tidak memasarkan hasil olahan sendiri karena keterbatasan waktu dari anggotanya sendiri".[82]

4. Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu

Dalam hal ini, pengemasan bahan pangan pokok akan memudahkan dalam hal penjualan atau pemasaran bahan pangan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Masrida mengatakan bahwa supaya terlihat rapi, bahan pangan seperti gula, tepung dan minyak, pihak E-Warong melakukan pengemasan ulang dari bentuk curah menjadi kemasan baru.[83]

Tujuan dilakukannya hal tersebut untuk memudahkan anggota dalam pemasaran produk, sarana di warung juga dilengkapi dengan timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan pangan pokok dan juga disediakan rak untuk penempatan bahan pangan tersebut supaya terlihat lebih rapi dan bersih.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan bahwa pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Desa Labuhan Rasoki belum terlaksana dengan maksimal.

Berbicara tentang dana dalam menjalankan program E-Warong KUBE PKH, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki jawaban yang sama yaitu

[82]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

[83]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

dana awal yang diperoleh anggota PKH yaitu sebesar Rp. 30.000.000 yang mencakup untuk biaya pembangunan, biaya pembelian peralatan warung dan juga modal untuk barang dagangan.

Hasil wawancara dengan Ibu Surianti mengatakan bahwa dana untuk mendirikan warung dan membeli perlengkapan seperti timbangan, kulkas, rak tempat barang dagangan, steleng kaca dan juga modal untuk belanja barang dagangan berjumlah sebesar Rp.30.000.000.[84]

Hal yang sama dipaparkan anggota PKH oleh Ibu Idar mengatakan bahwa modal yang diberikan pemerintah sebesar Rp.30.000.000, untuk biaya pembangunan, membeli perlengkapan seperti timbangan, frezeer, dan rak tempat barang dagangan, dan sisa dari pembelanjaan tersebut dijadikan modal untuk belanja barang dagangan.[85]

Hal yang sama diutarakan Ibu Heni Mariati yang mengatakan bahwa modal secara keseluruhan yang diberikan pemerintah sebesar Rp.30.000.000, untuk biaya pembangunan warung, pembelian perlengkapan dan juga untuk modal belanja barang yang akan di jual kembali.[86]

Dana tersebut sudah menjadi tanggung jawab para anggota PKH untuk mengelola dan mengembangkan warung tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, dana tersebut di setiap warung mengalami pasang surut

---

[84]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 03 Februari 2020.

[85]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 04 Februari 2020.

[86] Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

bahkan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ini, E-Warong KUBE PKH nya pernah mengalami kebangkrutan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Hasil wawancara dengan Ibu Sari Banun mengatakan bahwa E-Warong di desa ini pernah mengalami kebangkrutan saat dijalankannya jadwal pergantian anggota untuk menjaga warung ini setiap harinya.[87]

Hal yang sama di ungkapkan Ibu Masrida mengatakan bahwa E-Warong ini sempat mengalami kebangkrutan ketika disusun jadwal untuk menjaga warung setiap harinya, karena hal tersebut maka untuk saat ini yang menjadi penanggungjawab dengan E-Warong ini yaitu anggota anggota PKH tempat berdirinya E-Warong ini.[88]

Hasil wawancara dengan Ibu Idar yang mengatakan bahwa warung ini pernah mengalami kebangkrutan karena kurang kesadaran setiap anggota yang memiliki tanggung jawab terhadap E-Warong ini.[89]

Selain berbicara tentang dana ataupun modal untuk menjalankan E-Warong KUBE, dalam pelaksanaan E-Warong ini peran seorang pendamping desa sangat besar untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan E-Warong KUBE. Sesuai dengan

---

[87]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 09 Februari 2020.

[88]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

[89]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 04 Februari 2020.

hasil wawancara bahwa pertemuan dengan pendamping dilakukan cukup efektif yang dilakukan setiap bulannya.

Hasil wawancara dengan Ibu Surianti yang mengatakan bahwa pendamping desa dengan anggota PKH melakukan pertemuan setiap bulan untuk berdiskusi mengenai kemajuan program E-Warong KUBE PKH.[90]

Hasil wawancara dengan Ibu Zakiah yang mengatakan bahwa pendamping desa dan anggota PKH mengadakan pertemuan rutin setiap bulan melakukan bimbingan untuk memajukan pelaksanaan E-Warong.[91]

Hasil wawancara dengan Ibu Masrida yang mengatakan bahwa anggota PKH dengan pendamping desa mengadakan pertemuan setiap bulan yang bertujuan memberikan arahan dan bimbingan untuk kemajuan pelaksanaan E-Warong KUBE.[92]

Berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan E-Warong KUBE PKH belum maksimal dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.

2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Pembahasan hasil penelitian ini merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli

---

[90]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Huta Koje, pada tanggal 03 Februari 2020.

[91]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Salambue, pada tanggal 04 Februari 2020.

[92]Hasil Wawancara dengan Anggota PKH Desa Labuhan Rasoki, pada tanggal 05 Februari 2020.

sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan, peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah menggunakan teori William Dunn. Setelah melakkukan penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan pengelolaan E-Warong KUBE dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap kebijakan mempunyai tingkat pencapaian yang hendak dan ingin dicapai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai melalui program E-Warong KUBE ini yaitu, harapan pemerintah melalui program ini menginginkan akan ada sebuah perubahan yang lebih baik dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian, di ketiga desa tersebut target kegiatan pelaksanaan program E-Warong KUBE belum tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan, karena masih terdapat kejanggalan yang ditinjau dari pelaksanaan program.

Kemudian temuan di lapangan terhadap kendala dalam pelaksanaan E-Warong KUBE di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara disebabkan oleh anggota PKH nya sendiri yaitu kurang kesadaran akan kemajuan perekonomian bersama. Selain dari kendala dalam pelaksanaan program, E-Warong KUBE juga mempunyai beragam masalah seperti kurangnya pemahaman dari penggunaan salah satu sarana (mesin gesek), kurang adanya transparansi mengenai modal warung, adanya fisik sarana yang rusak, serta miskomunikasi antar sesama anggota dalam pelaksanaan kemajuan program E-Warong KUBE. Capaian dari pelaksanaan program ini di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tujuan program E-Warong KUBE PKH. Hasil penelitian atas dimensi efektivitas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Indikator Hasil Penelitian Efektivitas

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil Penelitian
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan program E-Warong KUBE untuk hal pencairan bantuan sosial berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa program belum terlaksana seperti penggunaan mesin gesek yang sesuai hasil penelitian, tidak semua anggota PKH mampu mengaplikasikannya.

Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai indikator efektivitas, peneliti memberikan saran kepada pihak Kemensos ataupun Dinas Sosial untuk melakukan sosialisasi program E-Warong KUBE serta memberikan arahan dan bimbingan dalam pengaplikasian penggunaan mesin gesek kepada seluruh anggota PKH supaya kedepannya para anggota PKH ini mampu dan memahami untuk menggunakan mesin gesek tersebut.

b. Efisiensi

Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang di inginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pihak Kemensos kepada anggota PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Anggaran dana dalam pembangunan E-Warong KUBE merupakan hal yang amat penting karena tanpa dana tidak mungkin akan berjalan maksimal, temuan di lapangan bahwa pencairan dana dari Kemensos akan disalurkan kepada anggota PKH untuk kemajuan E-Warong KUBE. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pendanaan awal E-Warong KUBE berjalan dengan baik, semua dana terealisasikan sebagaimana kesepakatan bersama.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dilakukan, ketiga desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki kasus yang sama yaitu pernah mengalami kebangkrutan akibat

kurang ketelitian dan kurangnya kesadaran terhadap E-Warong sebagai tanggungjawab bersama.

Kinerja dari seorang pendamping desa sangat penting dalam pelaksanaan warung tersebut karena tugas seorang pendamping yaitu memberikan arahan kepada anggota PKH nya supaya bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan E-Warong KUBE dalam mensejahterakan anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian, pertemuan dengan pendamping dilakukan cukup efektif yaitu setiap bulannya, maka dalam hal ini pendampingan dengan anggota PKH cukup maksimal, yang menjadi kendala yaitu berada di anggotanya sendiri yang masih belum paham tentang manfaat E-Warong KUBE ini didirikan yang menyebabkan sampai saat ini program pelaksanaan E-Warong KUBE belum tercapai dengan maksimal. Hasil penilaian atas dimensi efisien dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator Hasil Penelitian Efisiensi

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Hasil penelitian di lapangan bahwa pencairan dana diberikan oleh pihak Kemensos kepada anggota PKH untuk pendirian E-Warong KUBE, pembelian sarana dan prasarana, serta untuk modal awal

			berdagang yaitu berjalan dengan baik. Namun E-Warong KUBE di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara pernah mengalami kebangkrutan akibat kurang konsisten dalam mengelola warung. Mekanisme dalam pertemuan antara pendamping dengan anggota PKH cukup maksimal yang diadakan setiap bulannya. Namun untuk anggota PKH masih ada yang belum paham akan besarnya manfaat dari program E-Warong tersebut.

Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas melalui indikator efisiensi, peneliti memberikan saran bahwa pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga pelaksanaan E-Warong KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sasarannya secara lebih besar. Materi ini dimulai dari bagaimana manajemen pengelolaan KUBE, pengembangan jenis usaha, supervisi, hingga melakukan evaluasi.

c. Kecukupan

Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pelaksanaan program E-Warong KUBE dengan tingkat kebutuhan anggota PKH. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah biasanya mengharapkan suatu perubahan kondisi yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan anggota PKH.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengadaan program E-Warong KUBE memberi manfaat bagi anggota PKH, karena di warung ini para anggota PKH dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung lain, hal ini disebabkan karena harga di E-Warong KUBE hampir sama dengan harga grosir. Hasil penelitian atas dimensi kecukupan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Indikator Hasil Penelitian Kecukupan

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil penelitian
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Hasil penelitian bahwa pengadaan E-Warong di tengah-tengah anggota PKH (masyarakat miskin) sangat berpengaruh karena dengan adanya warung ini, setiap anggota PKH merasa diringankan bebannya dalam hal memenuhi kebutuhan karena harga yang ditawarkan di warung

			ini lebih murah dibandingkan dengan warung lain.

Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil penelitian melalui indikator kecukupan, peneliti menyarankan kepada anggota PKH supaya lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk supaya bisa bersaing dengan warung lain dan dapat meningkatkan pendapatan serta untuk memajukan E-Warong KUBE tersebut.

d. Perataan

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Pihak Kemensos dalam pencairan dana untuk pendirian E-Warong KUBE di setiap desa tidak memiliki perbedaan, dana dialokasikan dan disamakan sesuai dengan kebutuhan dalam pendirian warung tersebut.

Kebijakan pemerintah berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa anggaran dana yang diberikan pihak Kemensos kepada anggota PKH untuk masing-masing desa di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sudah dibagi sama rata tanpa

dibeda-bedakan. Hasil penelitian atas dimensi perataan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Indikator Hasil Penelitian Perataan

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil Penelitian
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Hasil penelitian bahwa anggaran dana untuk pendirian E-Warong KUBE di setiap desa sudah dibagi rata tanpa dibeda-bedakan.

Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil penelitian melalui indikator perataan, peneliti memberikan saran kepada pihak Kemensos bahwa sebelum pemberdayaan anggota PKH diberikan, hal penting dilakukan seperti penilaian terhadap kebutuhan kelompok. Kebutuhan ini sangat terkait dengan jenis usaha yang dikembangkan. Begitu juga dengan pemberian dana atau modal usaha yang diberikan kepada setiap kelompok, hal ini harus dipertahankan karena penyaluran modal dari pihak Kemensos kepada anggota PKH sangat baik yaitu nominal dana yang tersalurkan setiap kelompok itu sama tanpa ada unsur dibeda-bedakan.

e. Responsifitas

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa respon masyarakat terhadap E-Warong KUBE kurang memberikan dukungan untuk memajukan warung, namun terdapat juga beberapa yang mendukung, hal tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian yaitu mengatakan bahwa masyarakat juga ada yang berbelanja di warung tersebut, yang berarti ada beberapa masyarakat juga yang merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhannya karena mengingat harga yang relatif murah.

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pemasaran produk di E-Warong KUBE Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara hanya memasarkan produk jadi yang dijual kembali di warung ini, dan E-Warong KUBE sendiri tidak menghasilkan produksi yang diolah sendiri. Hal ini sangat disayangkan karena anggota PKH tidak bisa memanfaatkan waktu dan tempat yang telah disediakan untuk pemasaran produksi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pengemasan produk cukup baik karena di E-Warong KUBE Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara melakukan pengemasan ulang produk seperti gula, tepung dan minyak untuk memudahkan para anggota dalam proses pemasaran produk supaya terlihat lebih bersih dan rapi. Hasil penilaian atas dimensi responsifitas dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Indikator Hasil Penelitian Responsifitas

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil Penelitian
5.	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Hasil penelitian, respon masyarakat kurang dalam hal memberikan dukungan kepada anggota PKH untuk memajukan E-Warong KUBE. Anggota PKH tahu sebatas pemasaran produk jadi yang dijual kembali sedangkan untuk memasarkan hasil produksi sendiri anggota PKH tidak memanfaatkan waktu dan tempat yang telah disediakan. Anggota PKH mengemas ulang produk untuk memudahkan anggota dalam proses pemasaran produk.

Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai indikator responsifitas, peneliti memberikan saran kepada pihak Kemensos maupun Dinas Sosial untuk melakukan sosialisasi program E-Warong KUBE yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan program yang akan diberikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui program yang akan dijalankan. Sosialisasi program seharusnya disampaikan kepada beberapa kelompok sasaran, seperti

kepala desa, tokoh masyarakat, warga secara umum dan terutama kelompok sasaran (anggota PKH).

Dalam hal pemasaran, peneliti memberi saran kepada anggota PKH supaya lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan waktu dan tempat yang telah disediakan, akan lebih baik apabila anggota PKH menghasilkan produksi sendiri untuk dipasarkan sehingga akan dapat menambah pendapatan. Sebelum jenis usaha ditentukan perlu pertimbangan pasar secara matang. Pasar yang dimaksud tidak selalu berarti pasar tradisional atau modern. Pasar adalah adanya transaksi dari seorang atau kelompok pembeli yang hendak membeli produksi yang dihasilkan E-Warong KUBE.

f. Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Proses pelaksanaan E-Warong KUBE diharapkan mampu memberikan manfaat kepada anggota PKH dan juga berguna bagi masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dana yang diberikan pihak Kemensos dipakai seluruhnya untuk pelaksanaan program E-Warong KUBE berupa pembangunan warung, serta melengkapi sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk pemberdayaan anggota PKH terhadap warung dinyatakan kurang maksimal yang menyebabkan

warung tersebut belum berkembang. Hasil penilaian atas dimensi ketepatan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Indikator Hasil Penelitan Ketepatan

No.	Tipe Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil Penelitian
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Hasil penelitian, bahwa pengelolaan dana yang diberikan pihak Kemensos dipakai seluruhnya untuk pelaksanaan program E-Warong KUBE berupa pembangunan warung, serta melengkapi sarana dan prasarana. Untuk pemberdayaan anggota PKH terhadap warung dinyatakan kurang maksimal yang menyebabkan warung tersebut belum berkembang.

Sumber: Peneliti, 2020.

Berdasarkan hasil penelitian diatas pada indikator ketepatan, peneliti memberikan saran kepada pihak pendamping desa terkait dengan pemberdayaan anggota PKH, supaya disetiap pertemuan harus disusun rencana apa yang harus dilakukan untuk memajukan E-Warong KUBE, dan melakukan evaluasi terhadap apa saja yang telah tercapai dari rencana yang telah disusun sebelumnya, mungkin hal ini bisa menjadikan anggota PKH lebih berkualitas dan bertanggungjawab terhadap E-Warong KUBE PKH.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE PKH belum maksimal dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan E-Warong KUBE belum maksimal dilaksanakan diantaranya, kurang kesadaran anggota PKH terhadap tanggungjawab E-Warong KUBE yang menyebabkan E-Warong KUBE belum bisa dikatakan berhasil dalam peningkatan perekonomian bersama dan kurangnya pemahaman anggota PKH dalam menggunakan teknologi khususnya dalam penggunaan mesin gesek, karena hal terpenting dalam pelaksanaan E-Warong KUBE ini ialah penggunaan mesin gesek disetiap transaksi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara" pada poin menghapus masalah kemiskinan sesuai dengan 2 fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

   Pencapaian hasil pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara masih belum maksimal dirasakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.

   a. Desa Salambue, tujuan melayani pencairan bantuan sosial nontunai, melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial, serta melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu sudah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH. Sedangkan melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum, serta menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial nontunai belum dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.

   b. Desa Huta Koje, tujuan melayani pencairan bantuan sosial nontunai, melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial, serta melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok

dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu sudah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH. Sedangkan melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum, serta menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial nontunai belum dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk pelaksana E-Warong KUBE PKH.

c. Desa Labuhan Rasoki, tujuan melayani pencairan bantuan sosial nontunai, melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial, serta melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu sudah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH. Sedangkan melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat umum, serta menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial nontunai belum dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.

2. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Berdasarkan teori William Dunn adalah efektivitas target pelaksanaan, efisiensi usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang dinginkan, dan ketepatan tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bermanfaat sudah maksimal dilakukan. Sedangkan kecukupan pencapaian dari hasil yang diinginkan, perataan kebijakan yang dibuat untuk pencapaian target

pelaksanaan, dan responsifitas suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara", maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan penelitian berikutnya agar lebih baik, peneliti tetap menyarankan:

1. Bagi Pihak E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan tenggara

   Hadirnya E-Warong KUBE di tengah-tengah anggota PKH (masyarakat miskin) membawa dampak positif bagi para anggotanya. Banyak anggota PKH yang mengaku dengan adanya E-Warong KUBE ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bentuk bahan pangan pokok. Namun untuk pelaksanaan dan tanggungjawab atas E-Warong KUBE PKH masih kurang baik. Maka peneliti menyarankan bagi pihak E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara untuk tetap melaksanakan dan meningkatkan kualitas pengelolaan E-Warong KUBE tersebut.

2. Bagi Pihak Kampus

   Peneliti menyarankan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

3. Bagi Mahasiswa

   Peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

J. Moeleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2011.

Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____ , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*), Bandung: Alfabeta, 2012.

_____ , *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Umar, Husein, *Evaluasi Kinerja* Perusahaan, Jakarta: PT Gramedia utama, 2005.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis* Kurikulum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wirawan, *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Yusuf, Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Sumber Lain:

Agustanico Dwi Muryadi, "Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi," dalam *Jurnal Ilmiah Penjas*, Volume 3, No. 1, Januari 2017.

Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia.

Digilib.unila.ac.id oleh Yeen Gustiance, "*Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Nontunai* (BPNT) *Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (*Sustainable*

Developmentgoals/SDGS) Di Kota Bandar Lampung" (Tesis Online, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padangsidimpuan Semester* 1 Tahun 2019, Padangsidimpuan jl. Cempaka No.5, 2019.

Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan E-Warong KUBE*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*, 2016.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 2019.

Mawardi, M.Sulton dkk, *Kajian Awal Pelaksana Program E-Warong Kube-PKH*, 2017.

Undang-Undang Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 tentang Kelompok Usaha Bersama Pasal 1 ayat 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDNTITAS PRIBADI

1. Nama : Rahayu
2. Tempat/Tanggal Lahir : Huta Koje, 24 Maret 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 3 dari 5 Bersaudara
6. Alamat : Huta Koje Pijorkoling
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 0812-6575-9075
9. Email : rahayuajah874@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200502 Pijorkoling (2004-2010)
2. MTs Negeri 2 Padangsidimpuan (2010-2013)
3. SMA Negeri 3 Padangsidimpuan (2013-2016)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2016-2020)

III. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ngatino
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Legiyem
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Huta Koje Pijorkoling

IV. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,64
Judul Skripsi : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

V. Motto Hidup

"Never Give-Up, Because Winner Never Stop Trying"

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 26 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/01/2020 8 Januari 2020
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;
1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Aliman Syahuri Zein : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Rahayu
NIM	:	1640200116
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Konsentrasi	:	Manajemen Bisnis
Judul Skripsi	:	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong Kube PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 217 /In.14/G.1/G.4b/TL.00/01/2020 24 Januari 2020
Hal : **Mohon Izin Riset**

Yth; Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Rahayu
NIM	: 1640200116
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong Kube PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS SOSIAL
JL. Jend Abd. Haris Nasution Palopat Pijor Koling Padang sidimpuan
email : dinsos2018psp@gmail.com-Kode Pos : 22718

Padangsidimpuan, 29 Januari 2020

Nomor : 460/2191/2020
Hal : **Izin Riset**

Kepada Yth. :
Saudara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Sehubungan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kota Padangsidipuan tanggal 24 januari 2020 No : 217 / In.14 / G.4b TL.00/01/2020 tentang izin riset.

Dengan ini Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan pada prinsipnya menyetujui dan memberikan izin kepada Saudari :

Nama	: RAHAYU
NIM	: 1640200116
Semester	: VIII (Delapan)
Program studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk melaksakan riset pada E-WARONG KUBE PKH DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA " guna menyelesaikan skripsi dengan judul : " EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN E-WARONG KUBE PKH DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA ".

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Padangsidimpuan
Sekretaris,

30/01-2020.

DAULAT PARLAUNGAN,SE
Penata Tk.I
NIP. 19780818 200604 1 014

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data tentang "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara".

Pertanyaan

1. Apa nama E-Warong KUBE PKH di desa ini?
2. Sejak tahun berapa berdiri E-Warong KUBE PKH ini?
3. Berapa jumlah anggota PKH di desa ini?
4. Apa jenis usaha yang ditawarkan program E-Warong KUBE PKH di desa ini?
5. Selain produk sembako yang sudah ditentukan, apakah anggota PKH juga memasarkan hasil olahan sendiri?
6. Apakah anggota PKH berbelanja di warung ini?
7. Apakah masyarakat sekitar berbelanja di warung ini?
8. Apakah tidak terjadi persaingan dengan pedagang lain?
9. Dalam penentuan harga jual, apakah warung ini memberikan harga yang lebih mahal atau lebih murah dibandingkan dengan warung lain?
10. Dalam proses penjualan, bagaimana cara anggota PKH menjualnya supaya lebih rapi?
11. Dari mana sumber modal yang diperoleh untuk menajalankan E-Warong KUBE PKH ini?
    a. Berapa nominal modal yang diberikan?
    b. Bagaimana pengalokasian modal yang telah diberikan?
12. Bagaimana proses pencairan bantuan sosial non tunai yang diterima anggota PKH?
13. Apakah di warung ini melayani agen bank dalam penyaluran bantuan sosial non tunai?

14. Dalam penggunaan mesin gesek yang disediakan, apakah anggota PKH menggunakannya untuk layanan pembayaran telepon, listrik, dan air, begitu juga dengan layanan transfer uang?
15. Apakah anggota PKH dengan pendamping desa melakukan pertemuan rutin?

HASIL DOKUMENTASI

Lampiran 2

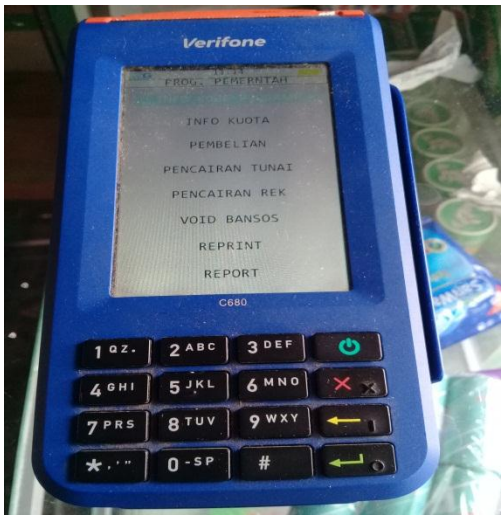

Alat gesek yang digunakan untuk pencairan dana bantuan sosial.

kartu bantuan dana sosial

Dokumentasi wawancara dengan anggota PKH Desa Salambue

Dokumentasi wawancara dengan anggota PKH Desa Huta Koje

Dokumentasi wawancara dengan anggota PKH Labuhan Rasoki